



TRITON

JURNAL MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

Volume 9, Nomor 1, April 2013

ANALISIS BEBERAPA PARAMETER KUALITAS AIR
DI DAERAH HABITAT TERIPANG

PENGEMBANGAN DESKRIPTOR AKUSTIK PLANKTON
DI TELUK AMBON BAGIAN DALAM
MENGUNAKAN ECHOSOUNDER BIOSONIC DT-X

PEMANFAATAN SUMBERDAYA PELAGIS KECIL DI
PERAIRAN MALUKU TENGAH
(Suatu Pendekatan Bioekonomi)

PENGARUH SUBSTRAT BERBEDA TERHADAP
PERTUMBUHAN TERIPANG PASIR (*Holothuria scabra*)

KINERJA APARAT PENGELOLA SUMBERDAYA PERIKANAN
BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA AMBON

EFEK PEMBERIAN PAKAN ALAMI *Artemia* sp. DAN *Tubifex* sp.
DENGAN DOSIS BERBEDA TERHADAP
PERTUMBUHAN IKAM MANDARIN (*Synchiropus splendidus*)

VALUASI EKONOMI EKOSISTEM HUTAN MANGROVE
DI WILAYAH PESISIR PANTAI KOTA AMBON

RENDEMEN EKSTRAK KASAR DAN FRAKSI PELARUT
ALGA MERAH (*Kappaphycus alvarezii* Doty)

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI
PENGHAMBAT BAKTERI *Vibrio* sp

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON

TRITON

Vol. 9

No. 1

Hlm. 1-74

Ambon, April 2013

ISSN 1693-6493

KINERJA APARAT PENGELOLA SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA AMBON

*(Performance of Fishery Resources Management Apparatus
Community Based in City of Ambon)*

Venda J. Pical

*Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
Jl. Mr.Cr. Soplanit, Poka- Ambon
vendapical@gmail.com*

ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan di Maluku maka salah satu faktor penting perlu diperhatikan adalah kinerja aparat pengelolanya, serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja aparat pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yaitu staf pemerintah dan *kewang* di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Lokasi penelitian adalah di daerah Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yaitu di Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, Negeri Leahari, Negeri Hukurila, Negeri Kilang dan Negeri Naku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan metode penelitian survey dan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik berstrata. jenis data yaitu primer dan sekunder. Data dianalisis secara dekskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yaitu staf pemerintah negeri maupun *kewang* tergolong dalam kategori tinggi. Saran penelitian, kinerja yang baik oleh aparat pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang tinggi maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan, selain itu pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Maluku sehingga dapat menyusun regulasi kebijakan yang menunjang ketahanan pangan lokal daerah.

Kata kunci: kinerja, aparat pengelola, sumberdaya perikanan, berbasis masyarakat

ABSTRACT: In the framework of the implementation of community-based resource management for sustainable fisheries in Maluku, one important factor to note is the performance of management personnel, as well as the participation of local communities in the management and utilization of fisheries resources in its possession. The purpose of this study was to evaluate the performance of government officials is a community-based fishery resource that governments and *kewang* staff in the sub-District of South Leitimur Ambon. The study area was some villages in south of Ambon Leitimur sub-district namely Hutumuri, Rutong, Leahari, Hukurila, and Naku. The method used in this research was to combine the methods of survey research methods and PRA (Participatory Rural Appraisal). Sampling technique used was stratified sampling. Data types consisted of primary and secondary. Data were analyzed by using descriptive qualitatively. The results showed that the performance of government officials as a community-based fishery resource namely government staff and *kewang* was categorized as high. The recommendation, the highly good performance by the management of community-based fisheries needed to be maintained and improved. Besides, the management of community-based fisheries in sub-District South Leitimur needs special attention from the local government so that it can compile Maluku regulation policies that support local food security area.

Keywords : performance, personel managers, fishery resources, community based

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM) merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Proses pemberian tanggung jawab ini disadari bahwa masyarakat lebih mengetahui keberadaan dan potensi sumberdaya perikanan yang dimilikinya sehingga masyarakat diharapkan dapat mengelola sumberdaya perikanan tersebut berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disepakatinya bersama berdasarkan kebutuhan dan keinginannya (Nikijuluw, 2002). Secara mendasar, pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat harus mampu memecahkan dua persoalan utama yang secara luas telah diketahui khalayak umum, yaitu : masalah sumberdaya hayati (misalnya, tangkap lebih, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem serta konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan modern), dan masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan keanekaragaman hayati laut (misalnya, berkurangnya daerah mangrove dan padang lamun sebagai daerah pembesaran sumberdaya perikanan, penurunan kualitas air, pencemaran) (Dahuri, 2003). Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain aparat pengelola sumberdaya perikanan, pemerintah dan partisipasi masyarakat. Di Kota Ambon, kewang merupakan aparat pengelola bekerjasama dengan pemerintah negeri dan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

Pada masa otonomi daerah saat ini dimana sistem pemerintahan di tingkat desa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh pemberlakuan undang-undang No 32 Tahun 2004. Maka kewang yang sebelumnya tidak diakomodir

dalam sistem pemerintahan desa kini kembali mendapatkan peran dan fungsinya dalam sistem pemerintahan negeri (Pical, 2007). Seiring dengan hal tersebut maka semua sistem pemerintahan desa telah berubah menjadi sistem pemerintahan negeri dimana kewang termasuk didalamnya. Berdasarkan hal tersebut kewang memiliki fungsi dan peranan penting dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Mengingat bahwa pada masa sentralisasi (UU. No 5 Tahun 1974), kewang telah mengalami kehilangan fungsi dan perannya. Sehingga pada saat ini ketika diaktifkan kembali terjadi kesulitan akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peran kewang.

Dalam rangka menjawab permasalahan di atas maka, pemerintah kota Ambon menempuh kebijakan untuk memberikan insentif kepada kewang disetiap negeri. Tujuan pemberian insentif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kewang supaya dapat bekerja dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayahnya. Namun selain insentif kewang dan staf pemerintah negeri juga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Namun hal ini belum diwujudkan sesuai dengan harapan.

Evaluasi kinerja aparatur pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dalam hal ini, kewang, staf pemerintah negeri dan masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan. Apabila kinerja aparatur pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tergolong baik maka kondisi sosial ekonomi masyarakat akan baik. Hal ini akan terlihat pada lingkungan perairan yang tetap produktif, aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan terus berlangsung, terjadi ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat lebih baik (Pical *dkk*, 2010). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja aparat pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat

yaitu staf pemerintah dan kewang di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di daerah Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yaitu di Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, Negeri Leahari, Negeri Hukurila, Negeri Kilang dan Negeri Naku. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tetap berlangsung sampai saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan metode penelitian survey dan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Metode survey yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok sedangkan beberapa teknik PRA yang dilakukan adalah :

- 1) Wawancara semi terstruktur yaitu tidak menggunakan kuesioner yang formal, tetapi hanya merupakan daftar pertanyaan terbuka yang sifatnya fleksibel (pedoman wawancara)
- 2) Yang diwawancarai adalah : beberapa individu dengan topik yang sama, informan kunci yaitu orang yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai topik yang diteliti dan diskusi terfokus pada kelompok (*Focus Group Discussion*)
- 3) Analisis diskusi kelompok dengan cara mendengarkan, belajar dari masyarakat dan memfasilitasi.

Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik berstrata yaitu untuk staf Pemerintah Negeri, pengurus Kewang, tokoh masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat. Pendekatan teknik sampling yang digunakan adalah kombinasi dari metode purposive sampling dan random sampling sehingga dengan metode tersebut diharapkan dapat mewakili populasi yang ada.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data pengalaman organisasi, data pendidikan non formal, data pendidikan formal,

data hubungan afiliasi, data frekuensi pertemuan dengan masyarakat, data sosialisasi peraturan, data kerjasama dengan instansi-instansi terkait, data pemberian hukuman dan sanksi, data pengawasan kepada masyarakat dan data sekunder terdiri dari data statistik perikanan, data pemerintah negeri, serta tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara, yaitu : kuesioner, wawancara secara mendalam (*in depth Interview*) juga dilakukan observasi di lapangan, catatan harian dan dokumentasi.

Pendekatan analisis yang akan digunakan adalah analisis dekskriptif kualitatif mengacu pada Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

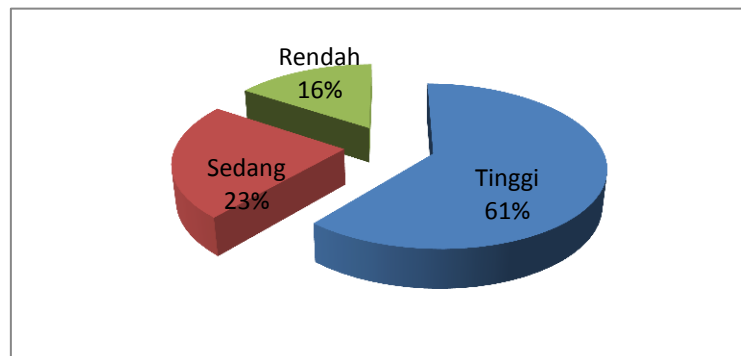
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Staf Pemerintah Negeri dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan

Kinerja staf pemerintah negeri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di kecamatan Leitimur Selatan dievaluasi dengan menggunakan beberapa variabel meliputi: Pengalaman organisasi (X1), tingkat pengetahuan non formal (X2), tingkat pendidikan (X3), afiliasi (X4), pertemuan dengan masyarakat (X5), penetapan aturan (X6), kerjasama dengan instansi terkait (X7), pemberian hukuman dan sanksi (X8), dan pengawasan kepada masyarakat (X9).

Hasil evaluasi kinerja staf Pemerintah Negeri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan berada pada kategori tinggi (61%) seperti terlihat pada Gambar 1.

Berdasarkan sembilan variabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf pemerintah negeri maka ada tujuh variabel memiliki jumlah skor yang berada dalam kategori tinggi. Adapun urutan masing-masing variabel tersebut : tingkat pendidikan formal

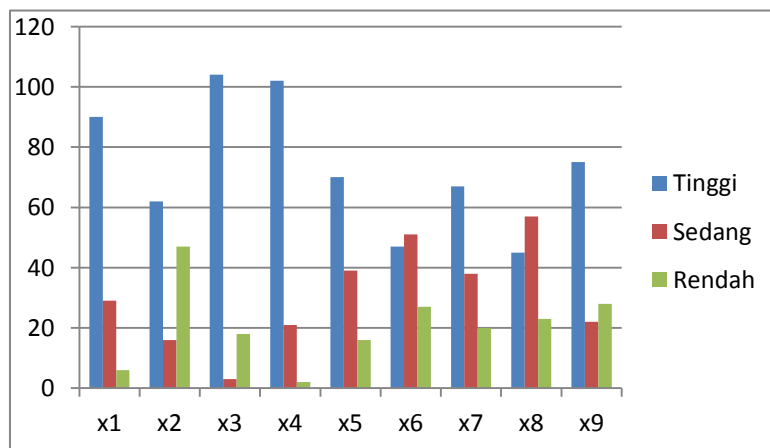


Gambar 1. Kinerja Staf Pemerintah Negeri dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan

(X3) (83,6%), hubungan afiliasi (X4) (81,6%), pengalaman organisasi (X1) (72%), pengawasan kepada masyarakat (X9) (60%), pertemuan dengan masyarakat (X5) (56%), kerjasama dengan instansi-instansi terkait (X4) (53,6), seperti terlihat pada Gambar 2.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka kinerja yang baik dari staf pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya

perikanan di Kecamatan Leitimur Selatan menunjukkan suatu kolaborasi manajemen sumberdaya perikanan antara pemerintah dengan masyarakat yang dikenal dengan Ko-manajemen. Ko-manajemen perikanan adalah pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan.



Gambar 2. Variabel Kinerja Staf Pemerintah Negeri dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan

Keterangan Gambar :

- X1 = Pengalaman Organisasi
- X2 = Pendidikan Non Formal
- X3 = Pendidikan Formal
- X4 = Hubungan Afiliasi
- X5 = Frekuensi Pertemuan dengan Masyarakat
- X6 = Sosialisasi Peraturan
- X7 = Kerjasama dengan Instansi-Instansi Terkait
- X8 = Pemberian Hukuman dan Sanksi
- X9 = Pengawasan Kepada Masyarakat

Pengertian ko-manajemen ini menyiratkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan inti ko-manajemen. Berdasarkan derajat tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki maka terbentuk suatu hirarki rentang ko-manajemen. Menurut Pomeroy and Berkes (1997) yang dikutip Nikijuluw (2002) terdapat sepuluh bentuk ko-manajemen, yaitu: 1) masyarakat hanya memberikan informasi kepada pemerintah dan digunakan sebagai bahan perumusan manajemen 2) masyarakat dikonsultasi pemerintah 3) masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama 4) masyarakat dan pemerintah saling berkomunikasi 5) masyarakat dan pemerintah saling tukar informasi 6) masyarakat dan pemerintah saling memberikan nasihat saran 7) masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan/aksi bersama 8) masyarakat dan pemerintah bermitra 9) masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat pemerintah dan 10) masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi antar lokasi daerah dan hal tersebut didukung pemerintah.

Melihat bentuk-bentuk ko-manajemen di atas maka berdasarkan kinerja staf pemerintah yang tinggi di Kecamatan Leitimur Selatan dapat terlihat pada bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk saling berkomunikasi, tukar informasi, melakukan kegiatan bersama dan melakukan pengawasan. Bentuk ko-manajemen yang ideal adalah pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang sejajar yang bekerjasama untuk melakukan semua tahapan dan tugas proses pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan. Menurut Pomeroy and Williams (1994) yang dikutip Zamani dan Darmawan (2001) bahwa penerapan ko-manajemen akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik dari suatu wilayah.

Untuk itu pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimilikinya. Salah satu cara adalah mempersiapkan kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat (Kusumastanto, 2003) melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

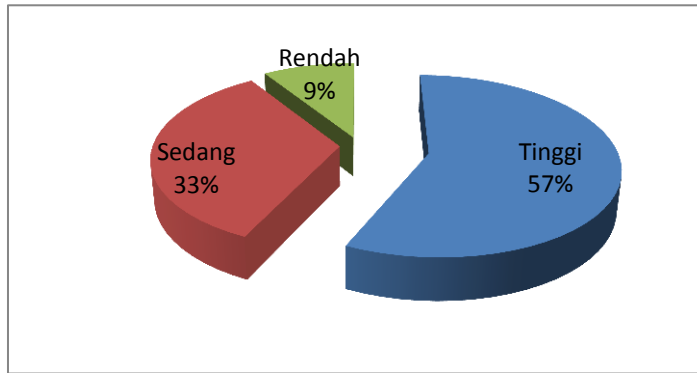
Hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan baik pendidikan

formal maupun pendidikan non formal merupakan variabel yang berada dalam kategori tinggi dan hal ini mendorong kinerja yang baik dari staf Pemerintah Negeri di Kecamatan Leitimur Selatan. Faktor pendidikan merupakan indikator penting bagi staf Pemerintah Negeri atau aparatur dalam menjalankan pembangunan desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nomleni *et al.* (2005) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi lokal adalah :

- a) Pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal
- b) Kompetensi yaitu kemampuan dan penguasaan bidang pekerjaan secara optimal dan kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan
- c) Sosial budaya

2. Kinerja Lembaga Kewang dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan

Kinerja lembaga Kewang dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dievaluasi berdasarkan beberapa variabel meliputi : Pendidikan formal (X1), keaktifan pengurus dalam menjalankan program (X2), tugas pokok kelembagaan (X3), kepatuhan aturan (X4), pengalaman organisasi (X5), aturan yang diterapkan (X6), pengetahuan non formal (X7) dan afiliasi (X8). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja lembaga Kewang dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan berada pada kategori tinggi, seperti terlihat Gambar 3. Hasil analisa menunjukkan dari delapan variabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga Kewang maka ada tujuh variabel memiliki jumlah skor yang berada dalam kategori kinerja yang tinggi. Adapun urutan masing-masing variabel adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut : pengalaman organisasi (X5) 98,90 %, pengetahuan non formal (X7) 80,21 %, afiliasi (X8) 76,92 %, keaktifan pengurus dalam



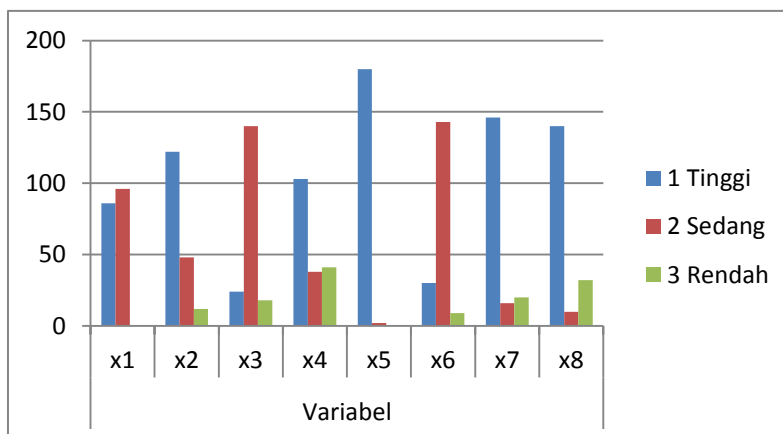
Gambar 3. Kinerja Lembaga Kewang dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan

menjalankan program (X2) 67,03 %, dan kepatuhan aturan (X4) 56,59 %, seperti terlihat pada Gambar 4.

Adapun variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja lembaga Kewang ada sebagian yang sama dengan yang digunakan untuk mengukur kinerja staf Pemerintah Negeri yaitu variabel pendidikan formal, pengetahuan non formal, pengalaman organisasi, dan afiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel yang sama tersebut ternyata variabel pengalaman organisasi, pengetahuan non formal

dan afiliasi berada dalam kategori tinggi dan diikuti dengan variabel lain yaitu keaktifan pengurus dalam menjalankan program dan kepatuhan aturan.

Kinerja yang baik dinilai berdasarkan beberapa variabel yang telah dikemukakan di atas bukan berarti bahwa keberadaan staf Pemerintah Negeri dan lembaga Kewang sudah optimal dan sempurna dalam menjalankan tugas-tugasnya bagi pembangunan masyarakat, namun ada ditemui juga beberapa kelemahan atau kekurangan.



Gambar 4. Variabel Kinerja Kewang dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan

Keterangan :

- X1 = Pendidikan Formal
- X2 = Keaktifan Pengurus dalam Menjalankan Program
- X3 = Tugas Pokok Kelembagaan
- X4 = Kepatuhan Aturan
- X5 = Pengalaman Organisasi
- X6 = Pengetahuan tentang aturan
- X7 = Pendidikan non Formal
- X8 = Hubungan Afiliasi

Hasil studi pengamatan dilapangan pada enam Negeri di Kecamatan Leitimur Selatan yaitu Hutumuri, Rutong Leahari, Hukurila, Kilang dan Naku menunjukkan bahwa Kepala Pemerintah Negeri (Raja) yang memiliki status defenitif adalah pada Negeri Hutumuri, Leahari (kondisi sakit), dan Hukurila (tidak tinggal di dalam Negeri) sedangkan Negeri Rutong, Kilang dan Naku masih menunggu proses pergantian Raja yang defenitif sehingga yang berfungsi menjalankan tugas-tugas pemerintahan Negeri adalah seorang pejabat yang merupakan salah satu wakil dari staf Pemerintah Negeri setempat. Walaupun demikian, namun hasil kinerja mereka tergolong baik karena terdorong sebagai satu komunitas yang homogen maka memiliki perasaan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan bagi kesejahteraan bersama dalam lingkungan dimana mereka tinggal.

Staf Pemerintahan Negeri sebagai pimpinan desa dan Kewang sebagai lembaga pengelolaan perikanan adalah merupakan menejer pengelolaan perikanan dan masyarakat sebagai pengguna sumberdaya perikanan di pedesaan harus turut berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan perikanan sebagai bagian dari pembangunan desa. Menurut Kurniantara *et al.* (2005), tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1) Basis informasi yang kuat 2) Kepemimpinan desa 3) Peranan organisasi lokal 4) Peranan pemerintah desa Dengan demikian peranan kepemimpinan desa sangat penting artinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan. Hal ini bisa ditempuh melalui peningkatan pengetahuan pendidikan non formal secara kontinyu sehingga dapat meningkatkan kualitasnya. Menurut Saad (2001) bahwa beberapa hal pokok dalam melaksanakan otonomi daerah pengelolaan sumberdaya perikanan adalah : 1) Kualitas sumberdaya manusia 2) Partisipasi masyarakat 3) Penegakkan hukum yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat dan 4) Ketersediaan dana untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan untuk peningkatan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka kinerja staf Pemerintah Negeri dan lembaga Kewang yang tergolong tinggi. Hal ini juga sangat ditunjang dengan adanya pemberian insentif kepada lembaga kewang dari pemerintah kota ambon. Adapun tujuan pemberian insentif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kewang supaya dapat bekerja dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayahnya. Namun selain insentif kewang dan staf pemerintah negeri juga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Namun hal ini belum diwujudkan sesuai dengan harapan. Namun kenyataan kondisi seperti ini aparat pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tetap dengan rasa tanggung jawab melakukan tugasnya dengan baik karena disitulah masyarakat menggantungkan mata pencaharian.

Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan faktor-faktor pendukung yang baik dalam menjaga kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal yang sampai saat ini masih jelas terlihat adalah melalui tradisi-tradisi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, seperti timba laor (cacing laut), antar sontong (cumi), pemanfaatan hurung (*Physalia physalis*), kapei (*Lepas antifer*), pemanfaatan jenis-jenis makroalga (sayur – sayur laut), penangkapan ikan terbang, kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan pada saat air surut baik pagi (Bameti) atau malam (Balobe). Kearifan lokal ini merupakan modal sosial penting bagi masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan sehingga dapat menunjang ketahanan pangan daerah. Bagi masyarakat di daerah Kecamatan Leitimur Selatan, faktor musim merupakan hal yang sangat mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan. Dimana pada musim Timur, kondisi ombak, angin dan hujan yang sangat besar sehingga tidak bisa beraktivitas ke laut. Sebaliknya di musim Barat, aktivitas melaut tinggi karena kondisi alam menunjang. Namun faktor musim tidak mempengaruhi masyarakat di daerah Kecamatan Leitimur Selatan dalam ketersediaan pangan di daerah tersebut. Pada musim Timur dimana sulitnya makan ikan

namun ada tersedianya jenis-jenis makroalga (sayur-sayur laut) yang dapat di konsumsi sebagai pengganti sayur dan ikan, selain itu juga ada pemanfaatan Hurung dan Kapei. Pada musim Barat, tersedia cacing Laut (Laor), cumi-cumi (sontong) dan ikan terbang dan berbagai jenis ikan lainnya yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap tradisional. Hal yang digambarkan ini merupakan sesuatu yang unik dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak sehingga kearifan lokal ini tetap dijaga dan dipertahankan di daerah Kecamatan Leitimur Selatan tetap baik dan dapat menunjang ketahanan pangan kota Ambon dan Daerah Maluku Pada umumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja aparat pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yaitu staf pemerintah di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon adalah tergolong tinggi untuk variabel tingkat pendidikan formal (X3) (83,2 %), hubungan afiliasi (X4) (81,6%), pengalaman organisasi (X1) (72%), pengawasan kepada masyarakat (X9) (60%), pertemuan dengan masyarakat (X5) (56%), kerjasama dengan instansi-instansi terkait (X7) (53,6%) dan pengetahuan non formal (X2) (49%).
2. Kinerja aparat pengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yaitu kewartu di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon adalah tergolong tinggi untuk variabel pengalaman organisasi (X2) (89,90 %), pengetahuan non formal (X7) (80,21%), afiliasi (X8) (76,92%), Keaktifan pengurus dalam menjalankan program (X2) (67,03%), dan kepatuhan aturan (X4) (56,59%).

Saran yang dapat diberikan berdasarkan evaluasi kinerja staf Pemerintah Negeri dan Lembaga Kewartu di Kecamatan Leitimur Selatan yang berada dalam kategori tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Kinerja yang baik dari staf Pemerintah Negeri dan para Kewartu di Kecamatan Leitimur Selatan perlu di pertahankan dan ditingkatkan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tetap berlangsung dengan baik demi kelangsungan kesejahteraan hidup masyarakat.
2. Kinerja yang baik ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah Maluku sehingga dapat menyusun regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan yang dapat menunjang ketahanan pangan masyarakat lokal khusus maupun daerah Maluku secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.412 hal.
- Kusumastanto, T. 2003. *Ocean Policy Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 160 hal.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nikijuluw, V.P. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo, Jakarta. 254 hal.
- Nomleni, N. C.Lay dan M. Muschab. 2005. Reformasi Birokrasi Lokal (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan . Sosiosains 18 (3) Juli. *Jurnal Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial* Universitas Gajahmada Yogyakarta. Hal 559-577
- Pical, V.J. 2007. *Dampak Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Pedesaan Maluku*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
- Pical,V.J., Savitri,I.K.E., Apituley,Y.M.T.N. 2009. *Kajian Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing.

- Universitas Pattimura. Departemen Pendidikan Nasional.
- Pical, V.J., Savitri, I.K.E., Apituley, Y.M.T.N. 2010. *Kajian Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Universitas Pattimura. Departemen Pendidikan Nasional.
- Pomeroy, R.S and Berkes. 1997. *Two to Tango: The Role of Government in Fisheries Co-Management*. Marine Policy.
- Pomeroy, R.S. and M.J. Williams. 1994. *Fisheries Co-management and Small-Scale Fisheries: A Policy Brief Fisheries Co-Management Project*. ICLARM
- Saad, S. 2003. *Politik, Hukum Perikanan Indonesia*. Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.
- Tulungen, J.J., T.G. Bayer, B.R. Crawford, M. Dimpudus, M. Kasmidi, C. Rotinsulu, A. Sukmara dan N. Tangkilisan. 2002. *Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat*. CRC Technical Report Nomor 2236. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett Rhode Island, USA. 77 hal.
- Zamani N.P dan Darmawan. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. *Prosiding Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Hal 47-60.